

Analysis of the Effect of Balance Funds on Economic Growth in Regency/Municipality in Jambi Province

Moh Sahroni Nurkodri^{1*}, Aditya Rahmadillah Malau², Fitri Amalia³

¹Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, Jambi, Indonesia

²Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, Jambi, Indonesia

³Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, Jambi, Indonesia

*Corresponding author email: mosahroni@gmail.com

Abstract—Introduction/Main Objectives: The purpose of this research is to examine the impact of balance funds on economic growth in Jambi Province regencies and municipalities. **Background Problems:** The greater the ability of the region to meet the costs of regional needs depends on the amount of income generated by the region so that it will be able to meet the needs of the community. Regional economic growth can be made possible through the allocation of balance funds that are managed properly and appropriately, which will later have an impact on regional economic growth. **Research Methods:** Time series data from 2010 to 2021 were used, as well as cross-section data from 11 regencies and municipalities in Jambi Province. Panel regression analysis was used to examine the data. **Finding/Results:** The results of the analysis show that, partially and simultaneously, each balance fund has a significant effect on economic growth in the districts and cities in Jambi Province. **Conclusion:** Based on the results of the analysis, it was found that the allocation of balancing funds plays an important role in economic growth in the regions. Balancing funds must be managed effectively and efficiently so as to increase economic growth in the region and improve people's welfare.

Keywords: General Allocation Fund¹; Special Allocation Fund²; Sharing Revenue³; Economic Growth⁴; Data Panel⁵

Abstrak—Pendahuluan/Tujuan Utama: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. **Latar Belakang Masalah:** Semakin tinggi kemampuan daerah untuk mencukupi biaya kebutuhan daerah bergantung pada banyaknya pendapatan yang dihasilkan oleh daerah sehingga akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dimungkinkan dari alokasi Dana Perimbangan yang dikelola dengan baik dan tepat yang nantinya akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi daerah. **Metode Penelitian:** Data yang digunakan adalah data time series tahun 2010-2021 dan cross section 11 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Data dianalisis dengan alat analisis regresi data panel. **Temuan/Hasil:** Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan masing-masing Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil analisis didapatkan hasil bahwa alokasi dana perimbangan berperan penting pada pertumbuhan ekonomi di daerah. Dana perimbangan harus dikelola dengan efektif dan efisien sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Dana Alokasi Umum¹; Dana Alokasi Khusus²; Dana Bagi Hasil³; Pertumbuhan Ekonomi⁴; Data Panel⁵

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah diharuskan untuk bekerja lebih efisien melalui tindakan-tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi. salah satu bentuk uluran tangan pemerintah pusat kepada daerah untuk menangani masalah ekonomi berupa alokasi APBN untuk membiayai kebutuhan daerah berupa Dana Perimbangan yang terdiri atas DAU, DAK, dan DBH. Ketiga jenis dana ini ditujukan oleh pemerintah pusat untuk mendanai kebutuhan daerah yang memiliki kaitan langsung dengan masyarakat yang dampaknya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Transfer pemerintah pusat ini memiliki peran dalam pembiayaan belanja kebutuhan pemerintah daerah, meskipun kebutuhan ini terus mengalami kenaikan setiap tahun sehingga berpengaruh pada perekonomian daerah. DAK dianggarkan kepada daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang berasal dari program prioritas nasional yang menjadi urusan daerah untuk membantu perekonomian daerah. Alokasi yang jumlahnya sangat besar ini sepatutnya mampu mempengaruhi perekonomian di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi berupa meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah akan tercapai dengan pengelolaan DAU, DAK, dan DBH yang optimal untuk membiayai urusan yang memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi daerah yang bersifat produktif.

Pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatannya membutuhkan pendapatan daerah untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang diemban oleh daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah untuk mencukupi biaya kebutuhan daerah bergantung pada banyaknya pendapatan yang dihasilkan oleh daerah sehingga akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat (Christy, et al., 2009). Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dimungkinkan dari alokasi DAU dan DAK yang dikelola dengan baik dan tepat yang nantinya akan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Setyowati et al. (2012) menyatakan usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas dapat diwujudkan dengan penerapan belanja daerah yang ditujukan pada kegiatan pembangunan yang memiliki hubungan erat dengan kebutuhan masyarakat. Upaya ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan dampak berupa pelayanan kepada masyarakat yang lebih berkualitas dan berlanjut pada peningkatan kemakmuran pada masyarakat.

Tabel 1. Jumlah Alokasi Dana Perimbangan di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2010-2021 (Miliar Rupiah)

TAHUN	DAU	DAK	DBH	TOTAL
2010	3.240	429	1.713	5.382
2011	3.844	398	1.814	6.056
2012	4.650	400	2.215	7.265
2013	5.364	446	2.332	8.142
2014	5.803	430	1.996	8.229
2015	5.746	704	1.358	7.808
2016	6.628	1.763	1.464	9.854
2017	6.560	1.566	1.408	9.534
2018	6.570	1.768	1.489	9.827
2019	6.841	1.992	1.822	10.655
2020	6.215	1.897	1.330	9.442
2021	6.297	2.066	992	9.355

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah

Jumlah alokasi Dana Perimbangan setiap tahun di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan pada periode tahun 2010-2021. Alokasi dana perimbangan pada tahun 2010 yang sebesar Rp. 5,382 Miliar meningkat pesat menjadi Rp. 10,655 Miliar pada tahun 2019 atau hamper sebesar 2 kali lipat alokasinya. Hal ini menandakan bahwa alokasi transfer dari pemerintah pusat ke daerah semakin besar setiap tahunnya pada periode ini.

Pertumbuhan ekonomi menjadi ketentuan utama dalam melaksanakan pembangunan karena ada hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi (Dinarjito & Dharmazi, 2020). Adanya peningkatan keluaran hasil produksi dan pendapatan nasional suatu negara dapat menggambarkan bahwa negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi. Capaian pembangunan ekonomi daerah adalah tolak ukur utama yang menjadi ukuran bagi tingkat pembangunan ekonomi di Indonesia. Menurut Winarto, et al (2022) upaya pembangunan ekonomi daerah dilandasi oleh keinginan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik melalui upaya membuat bidang kegiatan atau usaha yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menaikkan kapasitas kegiatan perekonomian yang dapat diupayakan baik oleh pemerintah daerah maupun sektor swasta. Keadaan perekonomian suatu daerah dapat ditinjau dari PDRB daerah yang dapat menggambarkan perekonomian suatu daerah dilihat dari peningkatan maupun penurunannya (Sisilia & Harsono, 2021). Suatu daerah dapat dikatakan berhasil melaksanakan kegiatan pembangunannya jika mengalami kemajuan perekonomian, namun hal ini bukan menjadi tolak ukur utama ketercapaian pembangunan (Todaro, 2006), di lain sisi

pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan berkelanjutan nantinya dalam kurun waktu yang lama akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan ekonomi (Nirmala et al., 2022).

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2010-2021 (Persen)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
2010	6,77	6,22
2011	8,06	6,17
2012	7,07	6,03
2013	7,07	5,56
2014	7,32	5,01
2015	4,82	4,88
2016	5,21	5,03
2017	5,02	5,07
2018	4,91	5,17
2019	4,59	5,02
2020	-0,43	-2,07
2021	3,93	3,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, diolah

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai pada tahun 2011 sebesar 8,06% yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada waktu yang sama yang hanya mencapai 6,17%. Namun selanjutnya terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2021 hanya mencapai 3,93%.

Penelitian oleh Arina et al. (2021) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado, namun secara simultan bersama dengan variabel PAD dan DBH memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Manado pada Tahun 2008-2017. Putri (2015) juga menyimpulkan dalam penelitiannya di Jawa Tengah bahwa DAU memiliki keterkaitan yang lemah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten atau kota Provinsi Jawa Tengah secara parsial, namun hasil analisis secara simultan dengan variabel PAD dan inflasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Hasil analisis yang berbeda ditemukan dalam penelitian Sinaga et al. (2020) yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun. Fadilla et al. (2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi pada wilayah timur Indonesia. Hasil serupa juga didapatkan Savitri & Suarjaya (2020) yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan hasil DAU tidak memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. DAU yang dialokasikan kepada daerah diserahkan pengelolaannya secara penuh kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki daerah. Alokasi DAU yang diterima oleh pemerintah daerah yang harusnya dimanfaatkan berupa pembiayaan belanja modal yang digunakan untuk menaikkan taraf hidup masyarakat, di lain pihak digunakan untuk belanja yang kurang produktif berupa belanja operasional barang dan jasa konsumtif dan belanja pegawai (Adhitya et al., 2022).

Pengalokasian Dana Perimbangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah diharapkan mampu untuk membiayai pembangunan daerah yang pada akhirnya akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah dan mengambil peran yang cukup vital dalam perekonomian daerah sehingga diharapkan dapat mendukung kegiatan perekonomian di daerah yang selanjutnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi tahun 2010-2021.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Konsep Keuangan Negara

Ichwan (1989) mengatakan bahwa keuangan negara adalah sebuah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang yang lazimnya satu tahun mendatang.

Menurut Basuki (2008), tidak ada program atau kegiatan yang terkait dengan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintah tanpa didukung dengan uang, sebaliknya uang atau sumber daya yang diperoleh dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan menurut fungsi-fungsi organisasi dalam pemerintahan. Dengan demikian, uang mengikuti fungsi (*money follows function*). Agar memperoleh uang atau sumber daya maka setiap program haruslah direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan oleh segenap unsur yang ada dalam pemerintahan, mulai dari tingkat atas sampai kepala daerah dan perangkatnya. Agar efektif dan efisien serta secara

formal mendapat legitimasi dari rakyat maka disusunlah perangkat hukum yang mengatur hal-hal tersebut.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah (Basuki, 2008).

2.2 Konsep Keuangan Daerah

Rencana kerja pemerintah daerah yang diwujudkan berupa uang (rupiah) pada satuan waktu tertentu merupakan bentuk dari keuangan atau anggaran daerah. Alat kebijakan utama yang digunakan oleh pemerintah daerah adalah anggaran daerah yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Mardiasmo, 2002). Makna lain keuangan daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh hak dan kewajiban daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan daerah dalam bentuk nilai uang dan semua bentuk kekayaan milik daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa keuangan daerah merupakan bentuk hak dan kewajiban pemerintah daerah yang disusun dalam uang (Rupiah) yang tujuannya adalah untuk melaksanakan pembiayaan kegiatan pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan yang bertujuan untuk memaksimalkan proses penyusunan APBD agar dapat menggambarkan dasar pengambilan keputusan untuk menentukan arah kebijakan, penentuan prioritas dan penentuan alokasi dan penyaluran sumber daya yang menjadikan masyarakat untuk secara aktif terlibat. Mekanisme ini akan menunjukkan dengan jelas pertanggungjawaban anggaran, dimana APBD adalah alat utama yang menciptakan tertibnya proses pengambilan keputusan tentang pendapatan dan belanja daerah (Yani, 2004). Penyusunan APBD mengikuti peraturan yang berlaku secara tertib sehingga produk yang dihasilkan adalah anggaran yang baik dan benar sesuai dengan landasan administratif yang mengaturnya.

2.2.1 Dana Alokasi Umum

Pemerintah Pusat melaksanakan desentralisasi dengan menganggarkan Dana Alokasi Umum

(DAU) yang berasal dari APBN dengan maksud untuk pemeratakan kemampuan keuangan yang berbeda-beda antar daerah dalam membiayai kegiatan yang dibutuhkan oleh daerah. Peran utama yang dilaksanakan oleh DAU adalah meratakan secara horizontal (*horizontal equalization*), dengan cara mencukupi celah fiskal (*fiscal gap*) yang ditimbulkan oleh selisih antara kebutuhan keuangan dengan kemampuan dan potensi keuangan daerah. DAU dapat pula disebut sebagai bantuan tanpa syarat (*unconditional grants*) lantaran alokasinya tidak memiliki kaitan dengan kegiatan maupun program tertentu.

Penentuan proporsi DAU untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota dilaksanakan dengan dasar perbandingan kewenangan. DAU merupakan salah satu bagian dari keseluruhan dalam Dana Perimbangan pada APBN dianggarkan kepada daerah menurut dasar konsep kesenjangan yang berkenaan dengan urusan pendapatan daerah (*fiscal gap*) yang berasal dari beda antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kondisi keuangan daerah atau kemampuan fiskal (*fiscal capacity*).

Pelaksanaan realisasi DAU setiap tahun terus mengalami kenaikan secara nominal. Hal ini dikecualikan pada tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan penerimaan negara yang turun akibat pandemi Covid-19. Penurunan realisasi juga terjadi pada tahun 2021 yang diakibatkan hal yang sama yaitu pendapatan negara yang terus menurun akibat Covid-19. Selain itu, kebijakan refocusing dilakukan pada belanja negara dan TKDD. Pemerintah juga melakukan kebijakan yang bersifat langsung atau *countercyclical* berupa transfer langsung untuk membantu masyarakat kurang mampu sebagai upaya untuk mengurangi dampak pandemi covid-19 atau disebut kebijakan jejaring perlindungan sosial (*social safety net*).

2.2.1 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang digunakan oleh daerah tertentu untuk membiayai program-program prioritas nasional yang bersifat spesifik yang menjadi urusan daerah. Dana ini dialokasikan kepada daerah yang berasal dari pendapatan APBN. Penggunaan DAK khususnya ditujukan untuk mendanai aktivitas pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan fasilitas fisik yang memiliki jangka waktu ekonomis yang lama yang di dalamnya meliputi pengadaan sarana fisik penunjang (Ardhani et al., 2011). Sejalan dengan pusat perhatian DAK yang ditujukan untuk

pembiayaan fasilitas fisik berupa infrastruktur yang menghasilkan aset tetap diharapkan nantinya berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena fasilitas-fasilitas tersebut digunakan oleh masyarakat daerah sebagai modal dasar yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang produktivitas dan meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah. DAK yang diarahkan pada penanaman modal berupa pengadaan infrastruktur fisik yang dapat menunjang kegiatan ekonomi masyarakat memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi daerah (Santosa et al., 2013). Dana Alokasi Khusus berdasarkan alokasi kegiatannya dipisah menjadi dua jenis berupa Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Kegiatan yang menjadi urusan pemerintah daerah yang merupakan prioritas nasional yang bertujuan untuk pengadaan fasilitas pelayanan umum dasar baik berupa upaya pemenuhan standar pelayanan minimal dan kegiatan untuk mewujudkan prioritas nasional serta kegiatan untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah dan kawasan yang memiliki kondisi khusus atau khas merupakan kegiatan-kegiatan yang secara khusus didanai oleh DAK Fisik. Selain itu, tujuan utama DAK Fisik adalah membantu daerah untuk mengurangi ketidakmerataan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan DAK Nonfisik merupakan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah. DAK Nonfisik ini secara umum terdiri dari Dana BOS, Dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan, Dana TPG ASN Daerah, Dana Tamsil Guru ASN Daerah, Dana TKG ASN Daerah dan DAK Nonfisik Jenis Lainnya. Setiap tahun pemerintah mengalokasikan DAK Nonfisik mengacu pada program prioritas yang disusun untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Pelaksanaan administrasi kegiatan, proses mempersiapkan kegiatan fisik, penelitian dan pelatihan, serta perjalanan dinas tidak dapat dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus.

2.2.1 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil merupakan komponen dalam Dana Perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana bagi hasil (*revenue sharing*) atau DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya, dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagihasilkan didasarkan atas daerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen DBH, kecuali DBH perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran DBH baik pajak maupun SDA dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). DBH Pajak bersumber dari penerimaan pajak dan DBH SDA bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA. Sejatinnya, DBH merupakan dana transfer yang bersifat *pure block grant*, akan tetapi beberapa jenis DBH kemudian diarahkan penggunaannya untuk tujuan tertentu (*earmarked*) sejak penetapan UU Nomor 33 Tahun 2004. Salah satu jenis DBH yang di-*earmarked* yaitu DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi yang seluruhnya digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional, dengan demikian jenis DBH ini berubah sifat menjadi *non-matching categorical grant*.

Seiring dengan perjalanan implementasinya, DBH masih dihadapkan pada dua tantangan utama. Pertama, perubahan sifat DBH dari yang seharusnya bersifat *pure block grant* perlahan menjadi *non matching categorical grant* yang sebagian penggunaan DBH diarahkan (*earmarked*) untuk tujuan tertentu akan berpengaruh pada mengecilnya ruang fiskal pemerintah daerah dalam membelanjakan DBH sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Kedua, kebijakan penyaluran DBH based on actual revenue menyebabkan ketidakpastian penerimaan daerah sehingga menyebabkan perubahan pada besaran pendapatan daerah yang kemudian berpengaruh pada pelaksanaan anggaran belanja di daerah.

2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuznets (2000), pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk

menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Dalam analisisnya, terdapat enam tanda atau ciri rangkaian pertumbuhan ekonomi yang bisa dijumpai pada mayoritas negara yang maju, yaitu: (1) tingginya perkembangan hasil jumlah barang atau jasa yang diproduksi perkapita dan laju pertumbuhan penduduk. (2) tingginya peningkatan unsur yang dapat digunakan dalam proses produksi yang berdampak pada produktivitas. (3) tingginya tingkat perubahan struktur sosial dan ideologi. (4) Negara akan menaruh minat untuk merintis ke wilayah negara lain untuk memasarkan hasil dan mendapatkan bahan baku yang baru. (5) Sebaran pertumbuhan ekonomi yang terbatas atau hanya sepertiga bagian dari total penduduk dunia.

Menurut Todaro (2006), ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu: (1) Akumulasi modal (*capital accumulation*) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan. Penanaman modal di bidang pembangunan SDM juga menaikkan kualitas modal yang pada akhirnya akan memberikan efek positif yang sama terhadap hasil dan jumlah produksi, bahkan akan lebih besar lagi mengingat terus bertambahnya jumlah manusia. (2) Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang semakin meningkat dalam pandangan tradisional merupakan salah satu hal yang berpengaruh positif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Besarnya jumlah tenaga kerja ini akan berkontribusi dalam menyediakan jumlah tenaga produktif, di sisi lain jumlah penduduk yang meningkat merupakan potensi kondisi pasar yang lebih besar. (3) Kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara-cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional.

Terdapat tiga ukuran untuk menentukan pertumbuhan ekonomi yaitu *output* yang terus meningkat, peningkatan *output* per pekerja yang mengalami kenaikan, dan peningkatan jumlah *output* perkapita (Boediono, 2012). Penilaian terhadap kenaikan kemampuan produksi menggunakan pertumbuhan *output* yang berhubungan dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja dan modal dalam suatu wilayah. Kenaikan *output* per tenaga kerja merupakan indikator yang sering digunakan untuk melihat daya saing wilayah karena menggambarkan peningkatan produktivitas. Produktivitas masukan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor termasuk perubahan teknologi, kemajuan pengetahuan lain dan ekonomisnya skala produksi (Case dan Fair, 2004). Sedangkan pertumbuhan *output* per kapita digunakan sebagai

indikator perubahan kesejahteraan ekonomi (Bhinadi, 2003).

3. METODE

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data *time series* selama kurun waktu tahun 2010-2021 dan *cross-section* 11 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta beberapa referensi studi kepustakaan lain berupa jurnal, artikel, makalah dan sumber lainnya yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

3.2 Metode Analisis

Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis data panel. Data panel merupakan kombinasi data *cross section* dengan *time series* (Dedi, 2012). Jika setiap unit *cross section* memiliki jumlah observasi *time series* yang sama maka disebut sebagai *balanced panel* (total jumlah observasi = $n \times t$). Sebaliknya jika jumlah observasi berbeda untuk setiap unit *cross section* maka disebut *unbalanced panel*.

Menurut Basuki dan Prawoto (2017), keunggulan penggunaan data panel memberikan banyak keuntungan diantaranya sebagai berikut:

1. Data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu.
2. Data panel dapat digunakan untuk menguji, membangun dan mempelajari model-model perilaku yang kompleks.
3. Data panel mendasarkan diri pada observasi yang bersifat *cross section* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*.
4. Data panel memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih bervariasi dan dapat mengurangi kolinieritas antarvariabel, derajat kebebasan (*degree of freedom/df*) yang lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.
5. Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.
6. Data panel dapat mendeteksi lebih baik dan mengukur dampak yang secara terpisah di observasi dengan menggunakan data *time series* ataupun *cross section*.

Kesulitan utama dalam model penelitian data panel adalah faktor pengganggu akan berpotensi mengandung gangguan yang disebabkan karena penggunaan observasi runtut waktu (*time series*) dan antar ruang (*cross section*), serta gangguan yang disebabkan keduanya. Penggunaan observasi antar ruang (*cross section*) memiliki potensi terjadinya ketidak konsistenan parameter regresi karena skala data yang berbeda, sedangkan observasi dengan data runtut waktu (*time series*) menyebabkan terjadinya autokolerasi antar observasi. Terdapat tiga model yang dapat digunakan untuk melakukan regresi data panel. Ketiga model tersebut adalah *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Adapun persamaan regresi data panel dalam penelitian ini adalah:

$$PDRB = f(DAU, DAK, DBH)$$

Keterangan:

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

DBH = Dana Bagi Hasil

Seluruh sampel dalam penelitian ini dilakukan transformasi ke dalam bentuk logaritma sehingga dapat terhindar dari asumsi klasik (Imam, 2011).

4. HASIL dan PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan menggunakan data panel didapatkan bahwa model yang terbaik adalah *Fixed Effect Model* sehingga hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.788017	1.226169	5.535955	0.0000
DAU	-4.20E-12	2.34E-12	-1.794285	0.0753
DAK	-1.15E-11	3.72E-12	-3.087852	0.0025
DBH	1.28E-11	4.27E-12	2.983526	0.0035
R-squared	0,469777			
Adjusted R-squared	0,411362			
Prob(F-statistic)	0,000000			

Sumber: diolah, 2023

Dari Tabel 3. dapat dilihat bahwa semua variabel signifikan pada tingkat $\alpha = 10\%$ yaitu variabel DAU dengan nilai 0.0000, variabel DAK sebesar 0.0025, dan variabel DBH sebesar 0.0035. Nilai *R-squared* 0,469777 dan nilai *Adjusted R-squared* pada model ini sebesar 0,411362 dan nilai *Prob(F-statistic)* dari hasil estimasi model ini adalah 0.000000.

Hasil regresi data panel pada Tabel 3. tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

4.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Tabel 3), dana alokasi umum ternyata berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Hal tersebut terlihat dari nilai koefisien yang didapat sebesar -4.20E-12 dengan probabilitas 0.0753. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikan pada $\alpha 10\%$ sehingga berdasarkan hasil regresi ini variabel DAU berpengaruh signifikan dan arahnya negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa jika terdapat kenaikan jumlah DAU yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi akan menurunkan tingkat capaian pertumbuhan ekonomi di daerah.

Penggunaan Dana Alokasi Umum di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi yang porsinya didominasi oleh belanja pegawai secara teoritis seharusnya mampu menstimulus konsumsi sehingga mampu memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Setelah belanja pegawai, DAU juga dipergunakan untuk belanja modal. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana baik dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat maupun penyediaan fasilitas bagi aktifitas ekonomi masyarakat. Kedua bentuk belanja ini seharusnya dapat memberikan dampak pada peningkatan perekonomian di daerah. Namun dengan upaya pemerintah untuk menggunakan anggaran DAU yang optimal pada kebutuhan daerah yang berhubungan langsung dengan perekonomian masyarakat diharapkan dampaknya akan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah.

4.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian (Tabel 3) didapatkan nilai koefisien regresi DAK sebesar -1.15E-11 dan Probabilitas 0.0025 yang berarti bahwa variabel DAK dalam penelitian ini berpengaruh secara signifikan dan arahnya negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis, seharusnya DAK memberikan dampak yang signifikan dan positif pada perekonomian daerah. Namun dalam penelitian ini, Dana alokasi khusus di Kabupaten/Kota dalam

Provinsi Jambi berpengaruh signifikan dan arahnya berlawanan dengan pertumbuhan ekonomi.

Pengalokasian DAK di Provinsi Jambi lebih difokuskan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Berbeda dengan DAU, pemanfaatan DAK oleh daerah tidaklah fleksibel dan leluasa tetapi harus mengikuti berbagai regulasi dari pemerintah pusat. Dengan fokus alokasi kepada belanja fisik sarana dan prasarana infrastruktur, aset tetap hasil belanja DAK akan menjadi modal dasar bagi masyarakat di daerah dalam melaksanakan aktivitas- aktivitas ekonomi yang mengarahkan pada peningkatan output dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengaruh ini dapat pula disebabkan oleh DAK yang sebagian besar dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang bisa jadi bukan menjadi prioritas pemerintah daerah yang bersangkutan pada tahun berjalan. DAK tidak secara langsung berhubungan dengan faktor-faktor yang secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi seperti jalan dan jembatan.

4.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara teoritis, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja yang dibutuhkan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian (Tabel 1), nilai koefisien regresi dana bagi hasil sebesar 1.28E-11 dan probabilitasnya yaitu 0,0035 yang berarti dana bagi hasil memiliki pengaruh signifikan dan searah dengan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulannya, semakin tinggi dana bagi hasil yang direalisasikan maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dana Bagi Hasil merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi daerah sehingga alokasinya sangat diperlukan bagi daerah. Hanya saja untuk pengelolaannya harus lebih difokuskan pada penggunaan untuk belanja dan membiayai sektor yang dapat lebih mendongkrak perekonomian di daerah.

5. KESIMPULAN dan SARAN

5.1 Kesimpulan

Dengan analisis dan interpretasi dari regresi data panel menggunakan model *Fixed Effect Model* untuk

mengetahui pengaruh variabel DAU, DAK, dan DBH pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi hasilnya adalah Dana Alokasi Umum secara parsial memiliki keterkaitan yang erat (signifikan) dengan pertumbuhan ekonomi, hubungan alokasi DAU yang diterima dengan pertumbuhan ekonomi ini memiliki arahnya negatif. Dana Alokasi Khusus secara parsial memiliki hubungan yang kuat/signifikan pada pertumbuhan ekonomi namun arahnya negatif. Dana Bagi Hasil secara parsial memiliki dampak yang signifikan dan searah dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2010-2021. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama (simultan) memberikan pengaruh yang kuat dan arahnya positif pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2010-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil masih memainkan peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di daerah.

5.2 Saran

Pengelolaan Dana Perimbangan diharapkan dapat diarahkan kepada bidang-bidang yang bersifat produktif yang mampu menghasilkan penerimaan bagi daerah. Dengan pengelolaan yang baik dan penerimaan daerah yang meningkat diharapkan daerah akan mampu membiayai sendiri kebutuhannya. Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU), pengusulan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh daerah agar dapat ditujukan pada sektor yang dapat secara langsung mendukung kegiatan ekonomi di daerah. Dengan pengelolaan yang baik diharapkan dapat memaksimalkan dana perimbangan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik dan mampu memberikan peningkatan pada taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, B., Prabawa, A., & Kencana, H. (2022). Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 288-295.
- Arina, M. M., Koleangan, R. A., & Engka, D. S. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil,

- dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi kota manado. *Jurnal pembangunan ekonomi dan keuangan daerah*, 20(3), 26-35.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). Analisis regresi dalam penelitian ekonomi dan bisnis. *PT Rajagrafindo Persada*, Depok, 90-100.
- Christy, F. A., & Adi, P. H. (2009, October). Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal dan kualitas pembangunan manusia. In *The 3rd National Conference UKWMS* (p. 14).
- Dinarjito, A., & Dharmazi, A. (2020). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 57-72.
- Fadilla, S. I., Zumaeroh, Z., Kencana, H., Retnowati, D., Purnomo, S. D., Winarto, H., & Adhitya, B. (2022, July). Desentralisasi Fiskal dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. In *MidYear National Conference and Call for Paper* (Vol. 1, No. 01).
- Fathiyah, F., Nasution, I., Pasla, B. N., Rasid, F., & Arif, M. (2022). Ratio Analysis of Regional Dependence and Independence in Measuring the Regional Financial Capability of the Jambi Provincial Government. *Jurnal Prajaiswara*, 3(1), 65-74.
- Fathiyah, F., Sukma, A., & Pasla, B. N. (2021). Analysis of the Accuracy Level of Revenue and the Distribution Mechanism of Tax Revenue Sharing and Non-Tax Revenue Sharing for the Jambi Province Government in 2015-2019. *Jurnal Prajaiswara*, 2(1), 15-24.
- Putri, Z. E. (2015). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi jawa tengah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2), 173-186.
- Dedi, R. (2012). *Ekonometrika & analisis runtun waktu terapan dengan Eviews*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Savitri, N. M. Y. S., & Suarjaya, A. A. G. (2020). Effect of Local Taxes, Regional Levies and general Allocation Funds (DAU) on the Economic Growth of Local Governments in Bali Province. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4(3), 379-386.
- Setyowati, L., & Suparwati, Y. K. (2012). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, dau, dak, pad terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan pengalokasian anggaran belanja modal sebagai variabel intervening. *Jurnal Prestasi*, 9(1).
- Sinaga, J. A., Purba, E., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnemi*, 2(1), 40-48.
- Sisilia, M., & Harsono, H. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang Tahun 2010-2019. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(1), 57-70.
- Todaro, M. P. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga*, Edisi 9, Jilid 1. Jakarta: Erlangga. Alih Bahasa Drs. Haris Munandar.
- Winarto, H., Zumaeroh, Z., & Retnowati, D. (2022). Pengaruh Human Capital, Upah Minimum dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 190-194.

